

ABSTRAK

Penulis melakukan kajian atas putusan tindak pidana sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2591K/Pid.Sus/2011 Terdakwa didakwa dengan dakwaan Subsider Pasal 3 ayat (1) *jo* Pasal 18 Ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dalam amar putusannya, Hakim menyatakan bahwa terdakwa dijatuhi hukuman di bawah batas minimum khusus yaitu dua bulan dengan boleh untuk tidak dilaksanakan serta membebaskan biaya perkara.

Pada penelitian sebagaimana peneliti lakukan, peneliti membahas Ketentuan Pidana Minimum Khusus Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi pada Studi Putusan No. 2591K/Pid.Sus/2011 dan Pertimbangan Hakim dalam Hal Penjatuhan Pidana Di Bawah Batas Minimum Khusus Terkait Kasus Tindak Pidana Korupsi pada Studi Putusan No. 2591K/Pid.Sus/2011, serta analisis yuridis terhadap pertimbangan Hakim dan solusinya. . Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif.

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan, yaitu: Pertama, penjatuhan pidana di bawah batas minimum khusus terkait kasus tindak pidana korupsi tidak sesuai dengan perundang-undangan yang ada dimana Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberikan batasan minimal dalam penjatuhan pidananya yaitu 1 tahun. Kedua, dalam menjatuhkan putusan di bawah batas minimum khusus terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2591K/Pid.Sus/2011 Hakim hanya memberikan pertimbangan dikarenakan objek dari korupsi hanyalah sedikit. Namun hendaknya hakim tidak hanya melihat dari teori pembalasan namun hendaknya bagaimana hakim bisa melihat dan memberi solusi dengan teori gabungan yaitu menggabungkan antara teori absolut atau pembalasan dengan pencegahan dan rehabilitasi. Hendaknya hakim dalam memberi putusan memperhatikan dari tujuan pidananya karena Hakim merupakan sosok wakil Tuhan yang dipercaya sebagai barometer keadilan. Dilihat dari kasus dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2591k/Pid.Sus/2011 terdakwa yang merupakan seorang dokter yang berada di wilayah jauh dari ibu kota maka, apabila terdakwa dipidana dengan pidana penjara maka anggota medis di wilayah tersebut akan kekurangan, dan pelayanan kesehatan akan terganggu keseimbangannya. Ketiga, Solusi dari masalah ini Penulis menyarankan untuk diberikannya pidana cicilan sebagai pidananya kepada terdakwa dengan dilaksanakan setiap akhir pekan hingga pidana tersebut selesai.

Kata Kunci : *Hukum, Pidana Minimu Khusus, Tindak Pidana Korupsi.*

ABSTRACT

The author conducted to study of the criminal offense in the Supreme Court's Decision Number. 2591K / Pid.Sus / 2011, the prosecutor have to accuse by Subsidiary indictment refer to Article 3 paragraph (1) jo Article 18 Paragraph (1), (2), (3) the act number 31, 1999 jo the act number 20, 2001 of criminal act of criminal act of the corruption. The Judge decided on his verdict to take defendant's prison below the minimum limit of the regulation for two months and to pay the court fee.

In this research the author has explain her opinion about criminal provisions below special limits for the act number 31, 1999 jo the act number 20, 2001 of criminal act of the corruption of the supreme court decesion Number 2591K/Pid.Sus/2011. The judge's consideration about his verdict to take defendant's prison below the minimum limit of the regulation for two months and to pay the court fee. Juridical analysis of judge's consideration and the solution. The normative juridical concept is used by this research.

For the result of research there are conclutions : First, to take defendant's prison below the minimum limit of the regulation is not suitable to the regulation. Second, the giving of the decision below the specific minimum limit for the perpetrators of corruption in the Decision of the Supreme Court Number 2591K / Pid.Sus / 2011 Judges only give consideration because the objects of corruption are only a few. But judges should not only see the theory of retaliation but should be how judges can see and provide solutions with a combined theory of combining absolute theory or retaliation with prevention and rehabilitation. Judges should give a ruling paying attention to their criminal objectives because the Judge is a representative of God who is believed to be a barometer of justice. Judging from the case in the Supreme Court Decision No. 2591k / Pid.Sus / 2011 the defendant who is a doctor who is in a region far from the capital city, if the defendant is convicted with imprisonment then the medical members in that region will be lacking, and health services will be disrupted the balance. Third, the solution of this problem the author recommends that criminal payments be given as a criminal to the defendant, which is carried out every weekend until the crime is finished.

Key Word : Law, Special Minimum Penalties, Corruption